

Politik Anggaran di Indonesia:

Antara Populisme, Prioritas Sosial,
dan Disiplin Fiskal

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



Rudy C Tarumingkeng : *Politik Anggaran di Indonesia: Antara
Populisme, Prioritas Sosial, dan Disiplin Fiskal*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

7 Maret 2026

POLITIK ANGGARAN DI INDONESIA: ANTARA POPULISME, PRIORITAS SOSIAL, DAN DISIPLIN FISKAL

Abstrak

Politik anggaran di Indonesia selalu bergerak di antara tiga tarikan besar: (1) **populisme fiskal**—dorongan untuk menghadirkan program yang cepat dirasakan publik, sering kali menjelang atau sesudah siklus elektoral; (2) **prioritas sosial**—kewajiban moral-konstitusional untuk melindungi kelompok rentan dan membangun modal manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; serta (3) **disiplin fiskal**—kebutuhan menjaga kredibilitas APBN melalui aturan defisit, pengelolaan utang yang pruden, dan kesinambungan pembiayaan. Tulisan ini menempatkan APBN sebagai “kontrak politik-ekonomi” yang diproduksi melalui negosiasi antarlembaga dan antarkepentingan, kemudian menunjukkan bagaimana ketiga tarikan tersebut muncul dalam data terbaru: defisit APBN 2025 melebar menjadi sekitar 2,92% PDB dengan belanja yang tetap ekspansif, sementara APBN 2026 ditetapkan dengan target defisit 2,68% PDB dan fokus pada belanja prioritas yang menegaskan agenda ketahanan pangan–energi–ekonomi. Di tengah agenda sosial besar seperti program Makan Bergizi Gratis yang diproyeksikan menuntut anggaran ratusan triliun rupiah, penguatan tata kelola belanja, penajaman subsidi, serta konsistensi

aturan fiskal menjadi prasyarat agar politik anggaran tidak berubah menjadi “perlombaan janji” yang menggerus ruang fiskal dan legitimasi kebijakan.

Kata kunci: APBN, populisme, belanja sosial, subsidi energi, mandatory spending, defisit, fiskal rules, kredibilitas fiskal

1. Pendahuluan: APBN sebagai Kontrak Politik, Bukan Sekadar Dokumen Teknis

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering dipersepsikan sebagai dokumen “angka-angka.” Dalam ekonomi politik, APBN adalah **peta kuasa**: siapa mendapat apa, kapan, dan dengan konsekuensi apa. Setiap rupiah belanja mencerminkan prioritas; setiap perubahan asumsi defisit mencerminkan pilihan; setiap alokasi subsidi mencerminkan kompromi antara stabilitas harga, daya beli, dan risiko fiskal.

Di Indonesia, politik anggaran berjalan di antara tiga tekanan yang sama-sama sah, namun kerap saling menegangkan:

Populisme fiskal: tuntutan “hasil cepat” dalam bentuk program yang mudah dikenali, komunikatif, dan luas.

Prioritas sosial: amanat konstitusi dan kebutuhan pembangunan manusia—terutama pendidikan dan layanan dasar—yang memerlukan belanja berkelanjutan, tepat sasaran, dan tidak selalu “seksi” secara politik.

Disiplin fiskal: keharusan menjaga defisit dalam batas aturan, menjaga biaya utang, dan mempertahankan kepercayaan investor/pasar, khususnya ketika ekonomi global bergejolak.

Tiga tekanan ini membentuk semacam **trilema anggaran**. Pemerintah dapat menambah belanja populis, tetapi risiko defisit melebar.

Pemerintah dapat memperketat defisit, tetapi ruang belanja sosial dan program baru menyempit. Pemerintah dapat memperbesar belanja sosial, tetapi harus berhadapan dengan rigiditas mandatory spending dan kebutuhan pembiayaan yang pruden.

Secara empiris, periode 2025–2026 memperlihatkan dinamika trilema ini dengan jelas. Kementerian Keuangan, misalnya, menunjukkan bahwa APBN 2025 dikelola ekspansif di tengah tantangan penerimaan dan kebutuhan stimulus; realisasi sementara defisit 2025 dilaporkan sekitar 2,92% PDB. ([Kemenkeu Media](#)) Sementara itu, APBN 2026 ditetapkan dengan target defisit 2,68% PDB dan menekankan belanja prioritas ketahanan pangan–energi–ekonomi. (anggaran.kemenkeu.go.id)

2. Kerangka Konseptual: Tiga Logika yang Selalu Bertemu dan Bertabrakan

2.1 Populisme Fiskal: Politik “Cepat Terasa”

Dalam literatur ekonomi politik, populisme fiskal merujuk pada kecenderungan pemerintah/elite untuk menonjolkan kebijakan yang **langsung terlihat manfaatnya** (misal bantuan tunai, subsidi, program makan/gratis tertentu), sering kali dengan komunikasi politik yang kuat. Populisme tidak selalu buruk: ia bisa menjadi koreksi terhadap negara yang terlalu teknokratis dan abai pada kemiskinan. Namun populisme menjadi problematik ketika:

perancangannya mengabaikan kapasitas administrasi,

pembiayaannya tidak jelas atau mengandalkan utang tanpa strategi,

evaluasinya lemah, sehingga biaya membesar tanpa dampak sepadan.

Populisme fiskal biasanya menguat ketika tekanan sosial meningkat (harga pangan, pengangguran), atau ketika pemerintah ingin memperkuat legitimasi melalui “program unggulan” yang simbolik.

2.2 Prioritas Sosial: Modal Manusia, Proteksi, dan Negara Kesejahteraan Minimal

Prioritas sosial adalah jantung pembangunan jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, ia bertaut dengan:

mandatory spending pendidikan (20% anggaran pendidikan), yang ditegaskan sebagai kewajiban dan tetap dijaga bahkan saat efisiensi anggaran. ([Media Keuangan](#))

perluasan perlindungan sosial (bansos, bantuan pangan, subsidi upah, program jaring pengaman) yang sering menjadi bantalan ketika ekonomi melambat.

Prioritas sosial, bila dikelola baik, meningkatkan produktivitas, menurunkan kemiskinan, dan memperkuat stabilitas politik. Tetapi ia membutuhkan disiplin desain: target yang tepat, integrasi data, dan evaluasi dampak.

2.3 Disiplin Fiskal: Aturan Main Kredibilitas

Disiplin fiskal adalah basis kepercayaan—bahwa negara mampu membiayai kebijakannya tanpa menciptakan krisis. Indonesia memiliki rujukan aturan fiskal yang sering diringkas sebagai **defisit maksimum 3% PDB dan rasio utang maksimum 60% PDB**, serta prinsip kehati-hatian. ([Kemenkeu Learning Center](#))

Disiplin fiskal bukan sekadar “menekan defisit,” melainkan menjaga: struktur pembiayaan yang aman, biaya utang yang terkendali (yield SBN), stabilitas makro dan ruang fiskal untuk menghadapi shock.

Kementerian Keuangan menekankan pembiayaan APBN 2026 melalui bauran utang dan non-utang yang dikelola prudent untuk menjaga kredibilitas fiskal.

3. Arsitektur Politik Anggaran di Indonesia: Siapa Menentukan Apa?

3.1 Basis Hukum dan Prinsip Tata Kelola

UU Keuangan Negara menekankan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat aturan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. ([Hukum Online](#)) Ini penting, sebab politik anggaran sering menggoda untuk “menang cepat” secara politik, tetapi prinsip legal menuntut akuntabilitas jangka panjang.

3.2 Siklus Anggaran: Dari KEM-PPKF ke UU APBN

Secara prosedural, kerangka makro-fiskal disiapkan melalui dokumen KEM-PPKF sebagai bahan pembicaraan pendahuluan pemerintah dan DPR untuk RAPBN. Dokumen KEM-PPKF 2026 misalnya tersedia resmi melalui portal fiskal Kemenkeu. ([Fiskal Kemenkeu](#))

Dalam praktik, fase ini bukan hanya teknokratik: di sinilah agenda prioritas dipertarungkan—apakah belanja lebih berat ke subsidi, program unggulan, infrastruktur, atau transfer daerah.

3.3 DPR, Banggar, dan Politik “Tawar-Menawar”

Banggar DPR adalah arena tawar-menawar postur (pendapatan, belanja, defisit, pembiayaan). Pada RAPBN 2026, postur yang disepakati menetapkan defisit Rp689,15 triliun atau 2,68% PDB. ([ANTARA News Megapolitan](#))

Angka defisit bukan sekadar rasio; ia adalah batas politis: seberapa jauh pemerintah berani ekspansif, dan seberapa jauh DPR menerima risiko fiskal.

3.4 “Rigiditas” Anggaran: Mandatory Spending dan Pos yang Sulit Dipotong

Kendala besar politik anggaran modern adalah rigiditas: banyak pos belanja bersifat wajib atau politis sulit dipotong. Pendidikan 20% adalah contoh mandatory spending yang ditegaskan tetap terjaga meski ada kebijakan efisiensi. ([Media Keuangan](#))

Rigiditas membuat program baru (terutama populis) harus “berebut ruang” dengan pos yang sudah terkunci. Akibatnya, inovasi belanja sering ditempuh lewat: (a) efisiensi belanja lain, (b) realokasi, (c) memperbesar defisit, atau (d) meningkatkan penerimaan—yang masing-masing punya biaya politik.

4. Membaca Data 2025–2026: Defisit, Stimulus, dan Narasi “Ekspansif tapi Terkendali”

4.1 APBN 2025: Dari Target ke Realisasi yang Melebar

Pada triwulan III 2025, Kemenkeu melaporkan defisit masih terjaga sekitar 1,56% PDB (year-to-date), menandakan desain APBN masih terkendali pada fase itu. ([Ministry of Finance Indonesia](#))

Namun dalam perkembangan akhir tahun, realisasi sementara APBN 2025 dilaporkan mengalami pelebaran defisit menjadi sekitar **2,92% PDB**. ([Kemenkeu Media](#))

Dokumen konferensi pers APBN KiTa (Januari 2026) menunjukkan gambaran postur realisasi sementara: pendapatan negara sekitar Rp2.756,3 triliun dan belanja negara sekitar Rp3.451,4 triliun, menghasilkan defisit sekitar Rp695,1 triliun (2,92% PDB). ([Kemenkeu Media](#))

Yang menarik secara politik bukan hanya angkanya, tetapi narasinya:

“ekspansif dengan defisit terkendali” di bawah batas 3% PDB. ([Kemenkeu Media](#))

Di sini terlihat logika politik anggaran Indonesia: pemerintah ingin tetap terlihat pro-rakyat dan responsif (ekspansif), tetapi sekaligus menjaga kredibilitas (tidak menembus 3%).

4.2 APBN 2026: Postur Defisit 2,68% dan Fokus Belanja Prioritas

APBN 2026 ditetapkan dengan target defisit Rp689,15 triliun atau 2,68% PDB. (anggaran.kemenkeu.go.id) Kemenkeu juga menekankan belanja prioritas untuk kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi.

(anggaran.kemenkeu.go.id)

Dari perspektif politik, postur 2,68% ini adalah kompromi: tetap ekspansif (tidak kembali ke defisit sangat kecil), tetapi berusaha menahan agar tidak mendekati 3% terlalu cepat, khususnya ketika agenda sosial baru menuntut pembiayaan besar.

5. Populisme vs Prioritas Sosial: Studi Kasus Program Makan Bergizi Gratis

5.1 Skala Program dan Rasionalitas Sosial

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki rasionalitas sosial yang kuat: perbaikan gizi, pengurangan stunting, peningkatan kualitas modal manusia. Dalam narasi kebijakan, MBG diposisikan sebagai investasi generasi.

Pada September 2025, rilis resmi kepresidenan menyebut target penerima bertahap dan menyebut kebutuhan anggaran yang mendekati Rp335 triliun untuk tahun berikutnya. ([Presiden RI](#)) Pemberitaan lain juga menyebut alokasi Rp335 triliun untuk MBG 2026. ([detiknews](#))

Secara ekonomi publik, program seperti MBG dapat dipahami sebagai *social investment*: manfaatnya jangka panjang (kognisi, kesehatan, produktivitas), tetapi biaya fiskalnya hadir sekarang. Persoalannya kemudian: bagaimana menjaga program ini tidak menjadi “ikon populis” yang menyerap ruang fiskal tanpa desain tata kelola yang matang?

5.2 Dilema Pembiayaan dan Kredibilitas Defisit

Reuters pada Februari 2026 melaporkan pemerintah tetap melanjutkan program makan gratis meski menghadapi kritik “pemborosan”, dan menyebut program itu didanai melalui langkah efisiensi anggaran agar tetap berada dalam batas defisit 3% PDB; Reuters juga menyoroti kekhawatiran investor, gejolak pasar, dan perubahan outlook peringkat utang yang menambah sensitivitas isu kredibilitas fiskal. ([Reuters](#))

Dari sini tampak jelas “arena politik anggaran”:

Arena sosial menuntut hasil cepat dan luas (anak sekolah, ibu hamil).

Arena fiskal menuntut batas defisit dan kewaspadaan pasar.

Arena teknokrasi menuntut desain operasional: pengadaan, rantai pasok pangan, standar keamanan makanan, dan pengawasan.

Dalam bahasa tata kelola, program besar seperti MBG memerlukan minimal empat lapisan kontrol:

targeting dan basis data (siapa berhak, bagaimana verifikasi),

pengadaan dan rantai pasok (mencegah mark-up dan monopoli vendor),

quality assurance (standar nutrisi, keamanan makanan),

evaluasi dampak (indikator stunting, kehadiran sekolah, anemia, dsb).

Jika empat lapisan ini lemah, program sosial yang baik dapat berubah menjadi “beban fiskal permanen.”

6. Subsidi Energi: Bantalan Sosial, Beban Fiskal, dan Politik Harga

6.1 Mengapa Subsidi Energi Sangat Politikal?

Subsidi energi adalah salah satu pos paling politis karena menyentuh: harga BBM dan listrik, ongkos produksi dan distribusi, inflasi dan daya beli, persepsi “negara hadir”.

Kementerian ESDM menjelaskan adanya alokasi subsidi energi pada 2025 termasuk subsidi listrik dalam besaran puluhan triliun rupiah. ([Kementerian ESDM](#))

6.2 Subsidi 2026 dan Risiko “Melebar”

Di RAPBN 2026, Kemenkeu/DJPb memaparkan proyeksi subsidi (energi dan non-energi) serta komposisinya; misalnya proyeksi subsidi energi sekitar Rp210,1 triliun dan non-energi Rp108,8 triliun pada RAPBN 2026. ([Kemenkeu](#))

Dalam dinamika global, risiko subsidi energi “jebol” sering muncul ketika harga komoditas naik atau nilai tukar melemah.

Di titik ini, politik anggaran menghadapi dilema klasik:

menahan harga demi stabilitas sosial (politik),

tetapi memperbesar beban fiskal (ekonomi),

sementara reformasi subsidi (penajaman sasaran) selalu menghadapi resistensi.

Solusi kebijakan yang sering disebut “jalan tengah” adalah **subsidi tepat sasaran**: menahan guncangan bagi kelompok rentan, sambil

mengurangi kebocoran ke kelompok mampu. Namun keberhasilan jalan tengah ini tergantung kapasitas data dan administrasi—sesuatu yang dalam praktik memerlukan konsistensi lintas kementerian dan lintas tahun, bukan sekadar keputusan satu musim.

7. Mandatory Spending dan “Anggaran yang Mengaku Prioritas, tetapi Sebenarnya Kaku”

7.1 Pendidikan 20%: Prioritas Sosial yang Mengunci Ruang Fiskal

Kemenkeu melalui Media Keuangan menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan 20% adalah kewajiban konstitusional dan tetap dijaga dalam APBN 2025 meski ada kebijakan efisiensi. ([Media Keuangan](#))

Dari perspektif kebijakan sosial, ini baik. Namun dari perspektif desain anggaran, mandatory spending menciptakan **rigiditas**: ketika muncul program baru berskala raksasa (mis. MBG), ruang realokasi menjadi sempit. Akibatnya, “politik anggaran” sering bergeser dari pertanyaan substansial (“apa yang paling efektif?”) ke pertanyaan distributif (“pos mana yang bisa dipotong tanpa menimbulkan biaya politik tinggi?”).

7.2 Mandatory Spending di Daerah dan Ketegangan Pusat–Daerah

DJPk menjelaskan mandatory spending di daerah, misalnya 20% untuk pendidikan di APBD dan ketentuan lain di sektor tertentu. ([Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan](#))

Konsekuensinya: pusat tidak bisa sekadar memerintah daerah “tingkatkan layanan,” karena daerah juga terikat struktur belanja wajib yang membatasi fleksibilitas.

8. Disiplin Fiskal sebagai Politik Kepercayaan: Defisit, Utang, dan Sentimen Pasar

8.1 Aturan Defisit sebagai “Garansi Minimal”

Materi Kemenkeu Learning Center menegaskan batas defisit 3% PDB dan rasio utang 60% PDB sebagai bagian dari aturan fiskal. ([Kemenkeu Learning Center](#))

Batas ini berfungsi sebagai jangkar: memberi sinyal bahwa negara tidak akan membiarkan defisit menjadi tidak terkendali.

Namun, “di bawah 3%” tidak otomatis berarti aman. Jika struktur belanja makin rigid dan program besar makin permanen, negara bisa terjebak pada defisit mendekati 3% secara kronis, sehingga ruang respons menghadapi krisis mengecil.

8.2 Kredibilitas dan Gejolak: Pelajaran dari Debat MBG

Reuters menautkan program belanja besar (termasuk makan gratis) dengan kekhawatiran investor serta sensitivitas pasar, seraya menegaskan pemerintah mengatakan tetap menjaga defisit dalam batas 3% PDB melalui efisiensi anggaran. ([Reuters](#))

Di sini terlihat bahwa disiplin fiskal bukan hanya soal angka, tetapi soal **kepercayaan**: apakah pasar percaya bahwa efisiensi itu nyata, bukan sekadar klaim; apakah publik percaya bahwa belanja tepat sasaran, bukan bocor.

8.3 Biaya Utang dan SBN sebagai “Indikator Kepercayaan”

Konferensi pers APBN KiTa menampilkan indikator yield SBN 10 tahun dan kondisi makro sebagai bagian dari narasi stabilitas 2025.

Dalam praktik, yield dan persepsi risiko adalah “pemungut pajak tak terlihat”: jika kredibilitas turun, biaya utang naik, dan ruang belanja sosial jangka panjang justru tertekan.

9. Arah Pembentukan: Agar Politik Anggaran Tidak Menjadi Perlombaan Janji

9.1 Membuat Program Populer Menjadi Program yang Terukur

Program sosial besar (mis. MBG) perlu “tata kelola seperti proyek negara”:

baseline indikator (stunting, anemia, kehadiran sekolah),

mekanisme evaluasi triwulan,

audit pengadaan,

sistem pengaduan publik yang kuat.

Tanpa itu, program sosial berisiko menjadi *fiscal entitlement* tanpa bukti dampak.

9.2 Menajamkan Subsidi Energi: Melindungi yang Rentan, Mengurangi Kebocoran

Proyeksi subsidi RAPBN 2026 menegaskan besarnya beban subsidi; politik harga harus diimbangi dengan reformasi targeting berbasis data.

([Kemenkeu](#))

Reformasi subsidi bukan sekadar menaikkan harga; ia membutuhkan desain kompensasi yang tepat, komunikasi publik, dan tahap transisi yang tidak memicu gejolak.

9.3 Memperkuat Kerangka Menengah (Medium-Term) dan Menekan “Belanja Musiman”

Salah satu sumber populisme fiskal adalah belanja yang sangat musiman dan mengikuti tekanan jangka pendek. KEM-PPKF berfungsi sebagai jembatan kebijakan agar APBN tidak menjadi dokumen setahun, melainkan bagian dari lintasan kebijakan menengah. ([Fiskal Kemenkeu](#))

Penguatan MTEF dan *performance-based budgeting* membantu menilai: program mana yang efektif, mana yang hanya “ramai” tetapi tidak berdampak.

9.4 Menjaga Defisit sebagai Ruang Krisis, Bukan Kebiasaan

Defisit 2025 yang melebar ke 2,92% PDB memperlihatkan betapa dekatnya ruang kebijakan dengan batas 3% ketika belanja ekspansif bertemu tantangan penerimaan. ([Kemenkeu Media](#))

Jika 3% diperlakukan sebagai “target nyaman”, bukan “batas darurat”, negara akan kekurangan amunisi saat krisis global atau bencana besar datang.

10. Kesimpulan

Politik anggaran di Indonesia adalah arena pertemuan antara **janji politik, kebutuhan sosial, dan kedisiplinan fiskal**. Populisme fiskal memberi energi dan legitimasi, tetapi dapat menjadi beban bila tidak terukur. Prioritas sosial adalah fondasi pembangunan manusia, tetapi menciptakan rigiditas jika tidak dikelola efisien. Disiplin fiskal adalah jangkar kepercayaan, tetapi mudah digoyang ketika program besar tumbuh cepat dan subsidi melebar.

Data 2025–2026 memperlihatkan gambaran khas Indonesia: APBN dikelola ekspansif namun berusaha dijaga di bawah batas defisit 3% (defisit 2025 sekitar 2,92% PDB), sementara APBN 2026 ditetapkan dengan target defisit 2,68% PDB dan fokus belanja prioritas ketahanan pangan–energi–ekonomi. ([Kemenkeu Media](#)) Di tengah agenda sosial besar seperti Makan Bergizi Gratis yang diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp335 triliun, tantangan kuncinya adalah memastikan bahwa belanja populer tidak merusak ruang fiskal dan tidak

mengorbankan kualitas belanja wajib yang sudah mengunci ruang anggaran. ([Presiden RI](#))

Pada akhirnya, politik anggaran yang sehat bukan politik yang anti-program besar, melainkan politik yang **mewajibkan setiap program besar tunduk pada disiplin desain, disiplin data, dan disiplin evaluasi**—sehingga populisme dapat “diubah” menjadi investasi sosial yang benar-benar produktif, dan disiplin fiskal tetap menjadi pagar yang melindungi generasi berikutnya.

Glosarium

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang; memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah; mencerminkan prioritas layanan publik di daerah.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Parameter makro (mis. pertumbuhan, inflasi, kurs, ICP, lifting) yang menjadi dasar perhitungan pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN.

Bansos (Bantuan Sosial)

Transfer non-kontributif dari pemerintah kepada rumah tangga/individu tertentu untuk mengurangi kemiskinan, melindungi daya beli, atau menutup kerentanan sosial.

Belanja K/L (Kementerian/Lembaga)

Belanja yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga untuk menjalankan program dan kegiatan (pegawai, barang, modal, bantuan sosial, dll.).

Belanja Non-K/L

Belanja pemerintah pusat di luar pagu kementerian/lembaga (mis. subsidi, bunga utang, sebagian belanja transfer tertentu—tergantung klasifikasi tahun berjalan).

Belanja Modal

Belanja untuk memperoleh aset tetap/aset lainnya (infrastruktur, peralatan, bangunan) yang manfaatnya lebih dari satu tahun.

Belanja Sosial (Social Spending)

Belanja yang ditujukan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial serta peningkatan kualitas manusia (pendidikan, kesehatan, perlinsos, program gizi, dll.).

Belanja Prioritas

Belanja yang difokuskan pada agenda pembangunan utama (mis. ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan) sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan fiskal tahun berjalan. ([Anggaran Kemenkeu](#))

Cash Transfer / Transfer Tunai

Bentuk bansos berupa uang (bukan barang/jasa), biasanya untuk menjaga daya beli.

Crowding-Out

Situasi ketika pembiayaan defisit (mis. lewat utang) mendorong naik suku bunga/menyerap likuiditas sehingga investasi swasta tertekan.

Defisit APBN

Selisih negatif antara pendapatan negara dan belanja negara dalam satu tahun anggaran; dibiayai melalui pembiayaan (utang/non-utang).

([Kemenkeu Media](#))

Defisit Primer

Defisit fiskal yang dihitung tanpa memasukkan pembayaran bunga utang; indikator penting untuk menilai dinamika keberlanjutan utang.

Disiplin Fiskal

Komitmen menjaga pengelolaan anggaran tetap prudent: defisit terkendali, utang dikelola hati-hati, belanja efisien, dan kredibilitas kebijakan terjaga. ([Kemenkeu Learning Center](#))

Efisiensi Anggaran

Upaya meningkatkan *value for money* melalui penghematan belanja yang kurang produktif tanpa mengorbankan layanan esensial (mis. menjaga amanat pendidikan 20%). ([Media Keuangan](#))

Fiscal Rules (Aturan Fiskal)

Batas/kaidah formal untuk menjaga kesehatan APBN (mis. rujukan defisit maksimum 3% PDB dan utang maksimum 60% PDB dalam diskursus kebijakan). ([Kemenkeu Learning Center](#))

Fiscal Space (Ruang Fiskal)

Kapasitas pemerintah memperbesar belanja/merespons krisis tanpa mengorbankan stabilitas fiskal dan kredibilitas pembiayaan.

Fungsi APBN sebagai Shock Absorber

Peran APBN meredam guncangan ekonomi (inflasi, perlambatan global, bencana) melalui belanja, perlinsos, subsidi, dan kebijakan fiskal kontra-siklus. ([Fiskal Kemenkeu](#))

ICP (Indonesian Crude Price)

Asumsi harga minyak mentah Indonesia; memengaruhi penerimaan migas dan besaran subsidi/kompensasi energi.

Kebocoran (Leakage) Subsidi

Bagian subsidi yang dinikmati kelompok tidak berhak (mis-targeting), sehingga efektivitas perlindungan sosial menurun dan beban fiskal membesar.

KEM-PPKF

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal; dokumen

strategis untuk pembicaraan pendahuluan RAPBN bersama DPR. ([Fiskal Kemenkeu](#))

Keseimbangan Primer

Posisi fiskal (surplus/defisit) tanpa bunga utang; menentukan apakah utang cenderung naik atau bisa distabilkan.

Kredibilitas Fiskal

Tingkat kepercayaan publik dan pasar bahwa pemerintah mampu membiayai programnya secara berkelanjutan dan transparan (berdampak pada biaya utang/yield SBN). ([Kemenkeu Media](#))

Mandatory Spending

Belanja wajib yang diamanatkan konstitusi/UU pada sektor tertentu (mis. pendidikan 20%); memperkuat prioritas sosial namun menambah rigiditas APBN. ([Kemenkeu Learning Center](#))

MTEF (Medium-Term Expenditure Framework)

Kerangka belanja jangka menengah yang menghubungkan anggaran tahunan dengan rencana 3–5 tahun agar program berkelanjutan dan lebih terukur.

MBG (Makan Bergizi Gratis)

Program sosial-gizi berskala besar untuk anak sekolah/kelompok tertentu; menuntut tata kelola pengadaan, keamanan pangan, serta pembiayaan berkelanjutan. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Outlook APBN

Perkiraan kinerja APBN sampai akhir tahun berdasarkan realisasi berjalan dan proyeksi (dipakai untuk penyesuaian kebijakan).

Pagu Indikatif

Batas awal alokasi anggaran K/L sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran sebelum pagu final ditetapkan.

Penerimaan Negara

Pendapatan APBN yang biasanya terdiri dari penerimaan perpajakan, PNBP, dan hibah.

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Penerimaan di luar pajak (mis. sumber daya alam, layanan, dividen BUMN tertentu, dan lainnya).

Populisme Fiskal

Strategi kebijakan yang menonjolkan program cepat-terasa dan mudah dikomunikasikan; bisa pro-rakyat, tetapi berisiko bila desain dan pembiayaannya lemah.

Primary Balance (Saldo Primer)

Istilah lain untuk keseimbangan primer; penting untuk analisis keberlanjutan utang.

RAPBN

Rancangan APBN sebelum disahkan; arena negosiasi politik utama antara pemerintah dan DPR. ([Anggaran Kemenkeu](#))

Rasio Defisit terhadap PDB

Indikator standar untuk menilai besaran defisit relatif terhadap ukuran ekonomi; dipakai sebagai jangkar kebijakan. ([Kemenkeu Media](#))

Rasio Utang terhadap PDB

Indikator beban utang relatif terhadap kapasitas ekonomi; terkait persepsi risiko dan biaya pembiayaan.

Subsidi Energi

Dukungan fiskal untuk menahan harga/menjamin akses energi (BBM, LPG, listrik) dengan tujuan stabilitas sosial-ekonomi; sangat politikal dan sensitif terhadap harga komoditas/kurs. ([Kementerian ESDM](#))

Transfer ke Daerah (TKD)

Alokasi dari APBN ke pemerintah daerah untuk mendukung layanan publik dan pembangunan di daerah.

Value for Money

Prinsip tata kelola belanja: belanja harus ekonomis, efisien, dan efektif (hasil sepadan dengan biaya).

Yield SBN

Imbal hasil Surat Berharga Negara; indikator sentimen pasar dan biaya utang pemerintah. ([Kemenkeu Media](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Antara News. (2025, September 18). *Kemenkeu ungkap defisit RAPBN 2026 naik jadi 2,68 persen dari PDB*. ([ANTARA News Megapolitan](#))

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, June 23). *Fiscal rules dan mandatory spending dalam penyusunan APBN*. KLC2 Kemenkeu. ([Kemenkeu Learning Center](#))

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Peraturan BPK. ([BPK Regulations](#))

DetikNews. (2025, August 15). *Prabowo anggarkan Rp 335 triliun untuk makan bergizi gratis 2026*. ([detiknews](#))

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, December 12). *Belanja prioritas APBN 2026: Menggerakkan transformasi untuk kedaulatan pangan, energi, ekonomi*. ([Kemenkeu](#))

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *KEM & PPKF (portal publikasi)*. ([Fiskal Kemenkeu](#))

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024, August 28). *Ini besaran alokasi subsidi energi di tahun 2025*. ([Kementerian ESDM](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, October 14). *Kinerja APBN hingga triwulan III 2025: Tetap adaptif dan kredibel*. ([Ministry of Finance Indonesia](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, October 14). *APBN 2026: Belanja prioritas mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi*. ([Anggaran Kemenkeu](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, January 8). *Konferensi pers: Realisasi sementara APBN 2025* [PDF]. ([Kemenkeu Media](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, February 23). *Konferensi pers APBN KiTa (Februari 2026)* [PDF]. ([Kemenkeu Media](#))

Media Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, April 10). *Efisiensi anggaran tetap menjaga alokasi 20% anggaran pendidikan dalam APBN 2025*. ([Media Keuangan](#))

Media Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, September 2). *APBN 2026 untuk kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi*. ([Media Keuangan](#))

Pemerintah Republik Indonesia. (2025, May). *(Pemukhiran) Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026: Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi* [PDF]. ([Fiskal Kemenkeu](#))

Reuters. (2025, June 17). *Indonesia disburses less than 3% of budget for Prabowo's flagship free meals programme*. ([Reuters](#))

Reuters. (2025, October 16). *Indonesia's free meals scheme falls 15% behind for lack of kitchens.* ([Reuters](#))

Reuters. (2026, February 13). *Indonesia to go ahead with free meals programme despite "extraordinary" campaign against it, president says.* ([Reuters](#))

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2025, September 29). *Presiden Prabowo: Target 82 juta penerima manfaat makan bergizi gratis akan terwujud bertahap.* ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Informasi APBN Tahun Anggaran 2025* [PDF]. ([Kemenkeu Media](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 7 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a157f1-04f4-83a0-8604-4ca5b8d013b4>